

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA SASAMA**

Dani Rachman

e-mail : dani.rachman1993@gmail.com

Djodi Setiawan

e-mail : djodisetiawan13071@gmail.com

Reza Maftuh Taufik Nugraha

e-mail : Rezamaftuh65@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang harus diterapkan setiap sekolah. Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana BOS sangat penting karena, dengan penerapan prinsip tersebut sekolah dapat dipercaya serta dapat meningkatkan partisipasi komponen sekolah. Untuk mencapai tujuan sekolah, maka diperlukan upaya yang lebih dari sekolah salah satunya adalah dengan pengelola keuangan dana BOS yang baik dan menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dana BOS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dan BOS pada SMA SASAMA, Pengaruh akuntabilitas dan transparansi ditunjukkan pula oleh hasil perhitungan manual serta Koefisien Determinasi (R-Square) yaitu sebesar 0,842 atau sebesar 84,2% dan sisanya yang merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Efektivitas pengelolaan dana BOS tetapi tidak diteliti ditunjukkan oleh nilai epsilon (ϵ) sebesar 0,158 atau sebesar 15,8% ($1 - R\text{-Square}$). Adapun faktor lain tersebut diantaranya Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Keuangan, Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran Berbasis Kinerja dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, dengan pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan global dalam kehidupan. Era globalisasi, pendidikan menjadi suatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi rendah. Rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin adalah biaya pendidikan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan.

Bentuk pendanaan pendidikan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Program BOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada

sekolah dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar mereka memperoleh layanan.

Adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolahuntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah dibelanjakan dan digunakan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 ini dilampiri petunjuk teknis kelola keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang dinilai oleh orang lain, karena kualitas performa atau kinerja dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi bidang garap, dan tanggungjawabnya. Sedangkan, akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan secara akuntabel dapat menjadikan sekolah tersebut mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan pemerintah.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraan, serta hasil-hasil yang dicapai. Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan secara transparan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, karena dengan mutu yang baik maka sekolah tersebut akan mendapatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat orang tua dan warga sekolah melalui penyediaan informasi.

Berdasarkan salah satu penelitian sebelumnya tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, banyak sekolah yang belum melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap Efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan yang dianggap tidak transparan akan berdampak negatif bagi perkembangan sekolah, karena orang tua akan meragukan sumbangan yang mereka berikan dan bantuan operasional sekolah yang ada akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

Begitupun yang terjadi di SMA SASAMA akuntabilitas dan transparansi terhadap Efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum di terapkan dengan baik karena masih ada penyimpangan penerapan dana BOS sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dan akan berdampak buruk bagi sekolah tersebut, diluar penerapan anggaran dana BOS pihak sekolah pun seringkali mengeluhkan tentang perealisasi dana BOS yang seringkali tidak tepat waktu.

Dari data di atas akan dapat diketahui bahwa sekolah yang melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan maka sekolah itu dapat dianggap sebagai sekolah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya jika sekolah tersebut tidak melakukan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan maka sekolah tersebut kurang dipercaya bahkan tidak dipercaya oleh masyarakat.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11 ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Pelayanan yang baik akan (kinerja). Pasal 34 ayat 2 juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA|Dani Rachman, Djodi Setiawan, Reza Maftuh Taufik Nugraha

pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), SMU serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Penilaian kinerja sekolah secara umum bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan pada unit pelaksana teknis (sekolah). Pengertian kualitas mencakup unsur-unsur konteks, masukan (input), proses dan hasil pendidikan (keluaran dan dampak pendidikan). Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang komprehensif dan dikembangkan berdasarkan pada standar mutu yang ditetapkan, hasil penilaian diharapkan dapat memetakan secara utuh dan komprehensif profil sekolah. Menurut Hoy dan Miskel (2001 :295-296) bahwa outcome kinerja menunjukkan kepada kuantitas produk dan jasa dari sekolah kepada para peserta didik, para pendidik, dan pihak-pihak lainnya, termasuk di dalamnya mutu output (hasil). Indikator dari outcome ini adalah prestasi akademik, kepuasan kerja, sikap peserta didik dan pendidiknya, angka putus sekolah, kehadiran guru, perhatian staf sekolah dan tanggapan masyarakat terhadap efektivitas sekolah. Kriteria proses merujuk pada jumlah dan mutu dan merupakan harmoni antara proses dan struktur internal yang mengubah input menjadi outcome. Kriteria proses merujuk pada iklim hubungan antar personal yang sehat, tingkat motivasi guru dan siswa yang tinggi, kepemimpinan kepala sekolah dan guru yang baik, prosedur pengawasan yang bermutu, mutu pengajaran penggunaan teknologi pengajaran, dan evaluasi personil. Kesemuanya ini berhubungan dengan kinerja outcome.

Menurut Depdiknas (2002) pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi lembaga pemerintah. Pengukuran ini meliputi penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Untuk tercapainya tujuan pendidikan maka sangat penting mengelola pendidikan dengan baik agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendidikan pun memerlukan adanya manajemen pendidikan yang berupaya mengoordinasikan semua elemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena manajemen pendidikan merupakan suatu proses yang merupakan daur (siklus) penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya.

Dari berbagai subfungsi manajemen sekolah, subfungsi yang juga dianggap penting adalah manajemen keuangan sekolah. Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan dalam rangka pelaksanaan. Hal ini merupakan bukti bagaimana kinerja sekolah dalam mengelola keuangan dengan baik dan akuntabel, sebab masalah keuangan adalah hal yang peka. Apalagi sekarang ini masalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pengelolaannya belum tepat serta tidak transparan. Sebagaimana yang dikutip penulis dari harian Pikiran Rakyat bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan pemerintah dalam jumlah miliaran rupiah, sebagian besar cenderung tidak transparan dan bahkan sulit diakses masyarakat. Bahkan, dalam dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RAKS) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), terdapat indikasi pengelolaan dana BOS tidak akuntabel. Sumber : SOLO, (PRLM).

Dalam konteks ini, pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan keefisienan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi boomerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia di Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefisienan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan kejelasan sasaran anggaran pengelolaan dana BOS.

Pendanaan yang bersumber dari dana BOS merupakan sumber utama pendanaan disekolah, diharapkan dengan dana tersebut sekolah tidak membebankan peserta didik dalam memenuhi sarana dan prasarana pendukung dalam proses belajar, sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam usaha peningkatan akuntabilitas kinerja sekolah, selain sarana dan prasarana dana BOS juga dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai disekolah sehingga memperbaiki akuntabilitas kinerja sekolah.

Jadi atas hal tersebut, pihak sekolah akan lebih efektif menggunakan dana BOS, namun dari dana BOS yang diterima pihak sekolah disertai sasaran anggaran yang jelas akan menentukan terhadap akuntabilitas kinerjanya. Dengan demikian penulis menduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi akan menentukan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA".

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Keuangan Sekolah

Menurut Nanang Fattah (2004:186-190) dalam buku Konsep dan Manajemen Berbasis Sekolah menyebutkan bahwa : "Sumber utama keuangan sekolah adalah: pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sekolah juga dapat mencari dana atau bantuan melalui berbagai cara selain melalui iuran BP3, misalnya melalui penyewaan fasilitas, pembayaran siswa, bantuan yayasan, dan gerakan pengumpulan dana".

Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP no 48 Tahun 2008 pasal 59) antara lain:

- a. Prinsip keadilan
Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang.
- b. Prinsip efisiensi
Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip transparansi
Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.
- d. Prinsip akuntabilitas publik
Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Manajemen keuangan menurut Mulyono (2010:146) dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

1. Perencanaan finansial (Budgeting) yaitu kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA|Dani Rachman, Djodi Setiawan, Reza Maftuh Taufik Nugraha

2. Pelaksanaan anggaran (implementation in values accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.
3. Evaluasi (Evaluation in values), yaitu merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Teguh (2008:2) bahwa : "Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat". Selanjutnya menurut Syahrudin Rasul (2002:8) bahwa : "Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan atau kegiatan bukan hanya saja pimpinan lembaga tetapi juga pihak pemerintah dan masyarakat umum".

Lembaga sekolah sebagai salah satu lembaga layanan publik pada saat ini dikelola secara desentralisasi, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola memimpin, dan mengontrol sekolah ada pada lembaga itu sendiri. Agar penyelenggaraan sekolah tidak berwenang dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan. Sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh masyarakat, oleh karena itu berarti akuntabilitas publik akan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah.

2.1.3 Pengertian Transparansi

Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa : "Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan." Menurut Weston dan Brigham dalam Sawir bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang dan persediaan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik (UU No. 2 Tahun 2011). Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Menurut Mardiasmo (2006:18) "Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan."

2.1.4 Pengertian Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan

efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transpormasi Pelayanan Publik* (2005:109) menyatakan bahwa : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya”. Selanjutnya Ihyaul (2009: 26) mengemukakan bahwa : “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).”

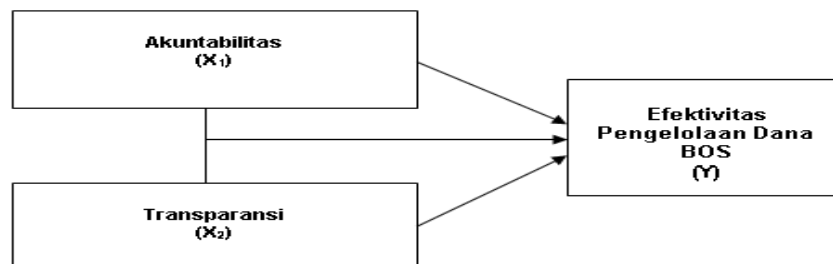
Adapun pengertian dana BOS menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa : “BOS adalah program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Selanjutnya menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan : “Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS”.

Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, menyatakan bahwa : “Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Paradigma Penelitian

c. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA.
2. Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA.
3. Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Y), Akuntabilitas (X_1), dan Transparansi (X_2).

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah studi empiris dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data *numeric* (angka).

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80) mendefinisikan populasi yaitu : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara, Komite / Wali Murid, dan Orang Tua Siswa SMA SASAMA Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.

3.2.1.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2011:61) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2011:68) bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun dalam metode ini sampel diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki hubungan erat dengan variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah :
Sebagai penanggungjawab keuangan sekolah
 2. Bendahara :
Sebagai pelaksana pengelola keuangan sekolah
 3. Komite/wali murid :
 4. Orang tua siswa :
Sebagai objek pertanggung jawaban dan transparansi sekolah terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah
- Adapun responden untuk penelitian tersebut berjumlah 30 orang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
 Sampel Penelitian

No	Jabatan	Banyaknya
1.	Kepala Sekolah	1
2.	Bendahara	1
3.	Komite/wali murid	1
4.	Orang Tua Siswa	27
Total		30

Sumber : Data diolah 2019

3.2.2 Metode Analisis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa Analisis regresi linear ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 .

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Akuntabilitas dan Transparansi dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 1.2
 Koefisien Korelasi Dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017 : 231)

1. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA|Dani Rachman, Djodi Setiawan, Reza Maftuh Taufik Nugraha

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

2. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a. Uji t (Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Inflasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- Apabila menggunakan program komputer (*software* SPSS), jika nilai sig < $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji F (Simultan)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- Apabila menggunakan program komputer (*software* SPSS), jika nilai sig < $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Menentukan Taraf Signifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.424	2.469		.982	.335
X1	.344	.112	.367	3.062	.005
X2	.599	.119	.605	5.044	.000

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.424	2.469		.982	.335
X1	.344	.112	.367	3.062	.005
X2	.599	.119	.605	5.044	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 17 Version

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,424 + 0,344X_1 + 0,599X_2$$

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta dengan nilai 2,424 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X_1 dan $X_2 = 0$), maka Efektivitas Pengelolaan Dana BOS adalah sebesar 2,424.
- b_1 sebesar 0,344 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS sebesar 0,344 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- b_2 sebesar 0,599 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Transparansi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS sebesar 0,599 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

4.1.2 Analisis Korelasi

Tabel 4.2
Hasil Analisis Korelasi Pearson

Correlations

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.771**	.833**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.771**	1	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.833**	.888**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.3
Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 ^a	.842	.831	1.790716

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 17 Version.

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi antara Akuntabilitas dengan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS adalah sebesar 0,833. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif,

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA|Dani Rachman, Djodi Setiawan, Reza Maftuh Taufik Nugraha

maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas akan diikuti oleh kenaikan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

- b. Korelasi antara Tranparansi dengan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS adalah sebesar 0,888. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas akan diikuti oleh kenaikan kenaikan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.
- c. Korelasi ganda antara Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan dengan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS adalah sebesar 0,918. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

4.1.3 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

a. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

- a. Pada tabel 4.1 diatas t_{hitung} untuk Akuntabilitas (X_1) adalah 3,062, pada t_{tabel} dengan dk 27 ($n-3 = 30-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,0518. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian pada kolom sig. di atas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar $0,005 < 0,05$. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y).
- b. Pada tabel 4.1 diatas, nilai t_{hitung} untuk Transparansi adalah 5,044, pada t_{tabel} dengan dk 27 ($n-3 = 30-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,0518. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian pada kolom sig. di atas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Transparansi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y).

b. Uji F (Simultan)

Tabel 4.4
Hasil uji F Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	463.003	2	231.501	72.194	.000 ^a
	Residual	86.580	27	3.207		
	Total	549.582	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 17 Version

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 72,194 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 30 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,35. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian dari tabel ANOVA^a di atas dapat dilihat nilai signifikansi uji F sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA

Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa variabel Akuntabilitas secara parsial memiliki pengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS sebesar 30,5% di SD SMA SASAMA, serta hasil t_{hitung} sebesar 3,062, pada t_{tabel} dengan dk 27 ($n-3 = 30-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,0518 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-t sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dan BOS (Y).

Dari hasil penelitian dan pembahasan, Akuntabilitas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA SASAMA. Dengan Akuntabilitas memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Efektivitas pengelolaan dana BOS, artinya semakin baik Akuntabilitas maka akan semakin baik pula Efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA SASAMA, demikian pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Ekowati (2016), yang menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Dengan demikian akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Sri Minarti (2011) mengemukakan bahwa : "Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan".

2. Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA

Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa variabel transparansi secara parsial memiliki pengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan dan BOS sebesar 53,7% di SMA SASAMA, yaitu hasil t_{hitung} 5,044, pada t_{tabel} dengan dk 27 ($n-3 = 30-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,0518 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Transparansi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan Efektivitas pengelolaan dana BOS (Y).

Transparansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS. Dengan demikian transparansi memberikan kontribusi positif dalam menentukan Efektivitas pengelolaan dana BOS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Ekowati (2016), yang menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA|Dani Rachman, Djodi Setiawan, Reza Maftuh Taufik Nugraha

kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Dengan demikian Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS

Menurut Sri Minarti (2011) Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya

3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA

Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa variabel akuntabilitas dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA SASAMA, yaitu hasil F_{hitung} 72,194 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 27 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,35. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS (Y). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi ditunjukkan pula oleh hasil perhitungan Koefisien Determinasi (*R-Square*) yaitu sebesar 0,842 atau sebesar 84,2% dan sisanya yang merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Efektivitas pengelolaan dana BOS tetapi tidak diteliti ditunjukkan oleh nilai epsilon (ϵ) sebesar 0,158 atau sebesar 15,8% ($1 - R-Square$). Adapun faktor lain tersebut diantaranya Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Keuangan, Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran Berbasis Kinerja dan lain sebagainya.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan Efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA SASAMA. Dengan Akuntabilitas memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Efektivitas pengelolaan dana BOS, artinya semakin baik Akuntabilitas maka akan semakin baik pula Efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA SASAMA, demikian pula sebaliknya..
2. Transparansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana BOS. Dengan demikian transparansi memberikan kontribusi positif dalam menentukan Efektivitas pengelolaan dana BOS.
3. Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dan BOS pada SMA SASAMA, Pengaruh akuntabilitas dan transparansi ditunjukkan pula oleh hasil perhitungan manual serta Koefisien Determinasi (*R-Square*) yaitu sebesar 0,842 atau sebesar 84,2% dan sisanya yang merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Efektivitas pengelolaan dana BOS tetapi tidak diteliti ditunjukkan oleh nilai epsilon (ϵ) sebesar 0,158 atau sebesar 15,8% ($1 - R-Square$). Adapun faktor lain tersebut diantaranya kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Keuangan, Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran Berbasis Kinerja dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA :

- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia Pusat Data Depkominfo.
- Fattah, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Hoy, Wayne K. & Miskel, Cecil G. (2001). Education Administration: Theory, Research, and Practice (6th ed., international edition). Singapore: McGraw-Hill C
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. Andi.
- Minarti, Sri. 2010, Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri; Yogyakarta : Ar-Ruuz Media.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta : Az- Ruzz Media
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Suatu pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta.
- Depdiknas. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi Kegiatan Belajar Mengajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang. Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Kemendiknas.2010. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.